

EDISI : Selasa, 12 Februari 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG



Nama Media:

BALI POST

Kategori:

MUSKRENBANG

# Tiga Desa di Setiap Kecamatan Jadi "Pilot Project" Terintegrasi Penanganan Kemiskinan

Terobosan baru digulirkan Pemkab Buleleng dalam rangka mengentaskan warga miskin di daerah ini. Mulai tahun ini, tiga desa di masing-masing kecamatan dipilih menjadi **pilot project** pengentasan kemiskinan. Pola pengentasan kemiskinan itu dilakukan secara terintegrasi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Buleleng. Lalu, bagaimanakah **follow up** secara riil penanganan kemiskinan terintegrasi itu?

DEMIKIAN terungkap pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Senin (11/2) kemarin. Forum ini dibuka Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Hadir juga Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjindra, Sp. OG., Ketua DPRD Gede Supriatna, Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litabng) Buleleng Nyoman Genep.

Pada kesempatan itu, Bupati meragukan validitas data warga miskin di daerahnya. Sampai sekarang, data itu ditengarai masih belum akurat. Alasannya, lembaga yang ditugaskan mencatat data kemiskinan itu angkanya sering berbeda. Perbedaan itu tidak terhindarkan, karena pola pendataan dan faktor yang digunakan menjadi penentu warga miskin itu sendiri sangat beragam. Bupati, menegaskan, tidak ingin data kemiskinan di Bali Utara itu amburadul. Karena itu,



Bali Post/kmb38

**BAHAS RKPD** – Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana (PAS), membuka Forum Konsultasi Publik membahas RKPD tahun 2020 Senin (11/2) kemarin.



# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media:

Kategori:

SAMBUNGAN

pihaknya mencoba melakukan terobosan untuk mencatat warga miskin secara akurat. Solusinya, dilakukan pola pengentasan kemiskinan terintegrasi.

"Dari segi kuantitas, angka kemiskinan kita mungkin paling banyak. Sebab, jumlah penduduk kita terbesar di Bali. Kalau persentasenya tidak terlalu tinggi. Bisa jadi berada di tengah-tengah. Agar data ini akurat, kita akan buat *pilot project* pengentasan kemiskinan terintegrasi," jelas Bupati.

Menurut Bupati, tiga desa di masing-masing kecamatan yang akan dipilih itu adalah secara jumlah paling banyak memiliki penduduk miskin selain juga yang persentase kemiskinan tertinggi. Setelah menetapkan tiga desa, pemerintah melakukan investigasi terkait penyebab kemiskinan di desa bersangkutan. Pemicu kemiskinan itu ditelusuri secara saksama. Sebab umumnya, warga miskin karena beberapa faktor. Bupati mencontohkan, bisa saja satu penduduk tidak mampu memenuhi keper-

luan hidupnya. Misalnya, karena menyandang disabilitas (cacat fisik). Namun bisa saja, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Karena itu, mereka tidak optimal mendapatkan hasil usaha tani atau bentuk pekerjaan lainnya. Setelah ditelusuri, pemerintah akan mengambil tindakan pengentasan kemiskinan secara terintegrasi. Artinya, penyebab kemiskinan itu akan ditangani secara tuntas melalui program kerja pemerintah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Melalui forum konsultasi publik RKPD tahun 2020, kita mulai menggarap pengentasan kemiskinan terintegrasi. Bisa saja ini sebagai model, setelah ada hasilnya akan dikembangkan. Itu bisa dilakukan oleh desa itu sendiri melalui jatah Alokasi Dana Desa (ADD)," tegasnya.

Kepala Bappeda-Litbang Nyoman Genep mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Buleleng 35.200 jiwa atau 5,6

persen dari jumlah penduduk. Penduduk miskin itu tersebar di 60 desa di Bali Utara. Menjabarkan terobosan pengentasan kemiskinan terintegrasi itu Bappeda-Litbang memilih tiga desa setiap kecamatan. Pemilihan desa itu dilihat dari jumlah penduduk miskin dan berdasarkan persentase kemiskinan.

Terkait target, Genep menyebut pengentasan kemiskinan terintegrasi itu sesuai faktor pemicu kemiskinan di desa bersangkutan. Dicontohkan, di satu desa itu memiliki potensi pertanian dan perkebunan, tetapi karena lemahnya SDM atau pemasaran, dan infrastruktur, maka OPD terkait harus menyusun program dan anggaran yang dituangkan di RKPD tahun 2020.

"Dalam diskusi publik ini, kita sampaikan program dan anggaran. Kita minta masukan dari *stakeholders* terkait percontohan pengentasan kemiskinan terintegrasi di tiga desa per kecamatan, seperti keinginan Bupati," tegasnya. (mud)



Nama Media: **BALIPOST**

Kategori: **RTH**

**Proyek RTH Bung Karno Tak Tuntas**

# Badan Patung Dititipkan di Yogyakarta

Singaraja (Bali Post) -

Proyek tahap ketiga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, ternyata gagal dituntaskan. Pelaksana proyek yang sudah mendapatkan perpanjangan pekerjaan selama 50 hari, tidak dapat menuntaskan pekerjaannya. Atas kondisi itu, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) menitipkan bagian patung yang belum tuntas itu di tempat patung itu dikerjakan, di Yogyakarta.

Dalam proyek lanjutan itu, pelaksana proyek seharusnya menuntaskan pemasangan patung Bung Karno. Patung yang semestinya berdiri kokoh di areal inti RTH itu ternyata tidak selesai dikerjakan. Sampai kontrak berakhir, pelaksana hanya menyelesaikan bagian kaki dan kepala patung. Sedangkan, badan patung Bung Karno belum tuntas dikerjakan. Karena itu, bagian patung itu dititipkan pada lembaga perajin di Yogyakarta.

Saat ini, bagian badan atas dan tangan saja yang belum dikerjakan. Namun karena batas waktu kontrak sudah habis, maka seluruh peker-

jaan pembuatan patung itu terpaksa dihentikan.

Kepala Dinas Perkimta Ni Komang Surattini, Senin (11/2) kemarin, mengatakan pematung yang dikontrak oleh pelaksana proyek sudah membuat cetakan patung. Cetakan itu dibuat dengan bahan dasar fiber. Pematung tinggal melakukan cor logam termasuk pencetakan, sehingga bagian patung itu tuntas. Hanya, pengecoran dan pencetakan logam membutuhkan waktu sekitar tiga pekan. Akibatnya, cetakan patung itu dibiarkan di Yogyakarta. Namun, dititipkan secara resmi menggunakan berita acara. "Su-

dah dengan berita acaranya. Semua bagian yang sudah selesai, termasuk kepingan, semuanya kami simpan di RTH. Sedangkan yang belum selesai dikerjakan kami titipkan di Yogyakarta," katanya.

Menyusul tidak tuntasnya pelaksanaan proyek itu, Surattini berjanji melakukan kajian teknis. Kajian itu akan diajukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pihaknya akan meminta fatwa, apakah proyek itu bisa dilanjutkan dengan prosedur penunjukan langsung (PL) atau harus dimulai dari nol lagi.

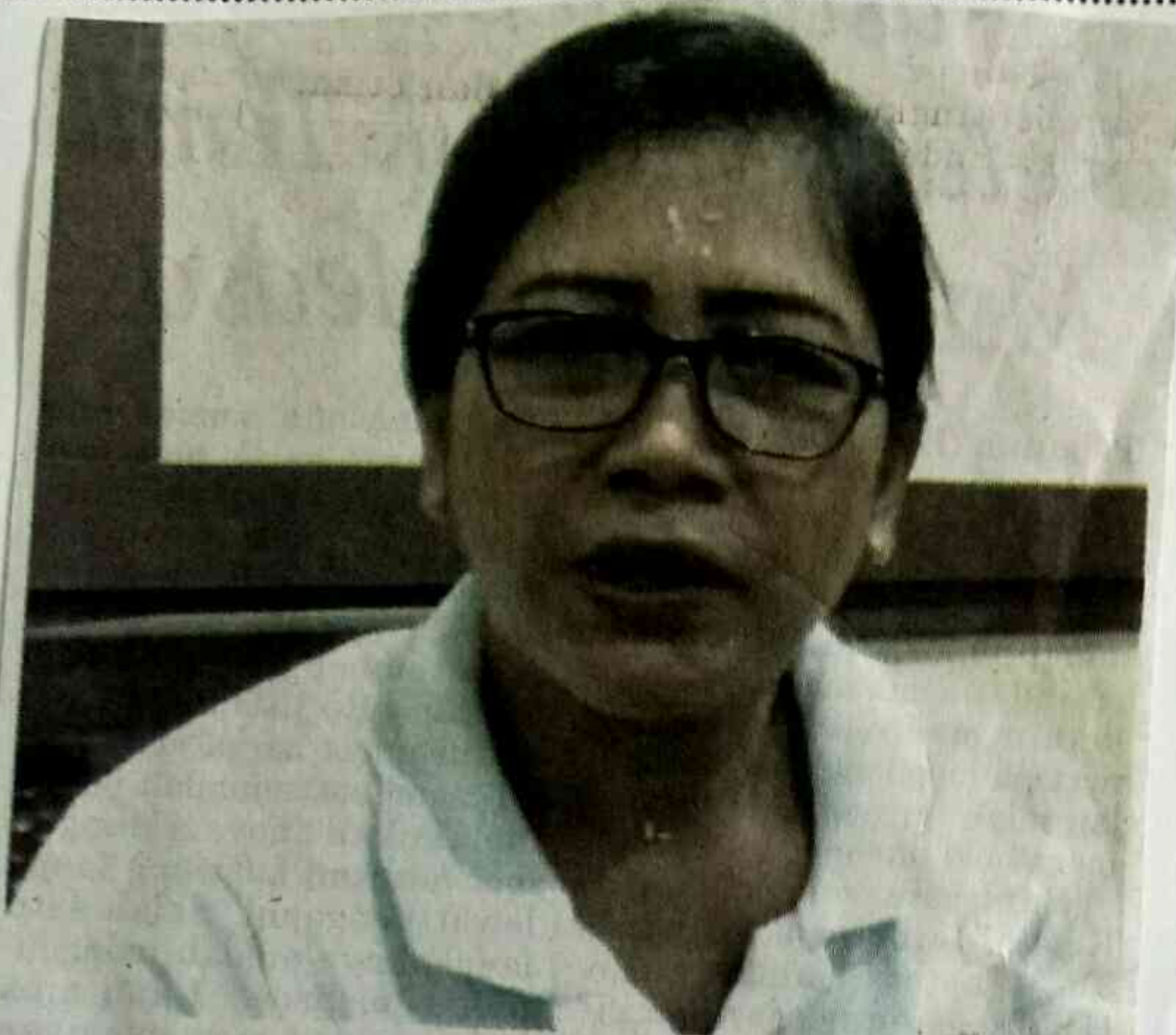
"Kami tidak ingin salah melangkah. Pasalnya, tumben terjadi seperti ini. Pembuatan patung jadinya setengah saja. Kami akan melakukan kajian dulu. Kalau dilanjutkan seperti apa kebijakannya. Kalau mulai dari nol juga kami perlu petunjuk lanjutan," tegasnya.

Selain itu, pemerintah masih melakukan penghitungan total pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor pelaksana. Proyek itu diperkirakan



# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Media: *KOMPAS* Kategori: *Gubernur*



***Ni Komang Surattini***

Bali Post/kmb38

baru selesai 49 persen dari total biaya pembangunan Rp 5,4 miliar. Sejauh ini, pemerintah baru membayar kepada pemborong Rp 2,64 miliar. Pemer-

intah akan menagih denda keterlambatan proyek Rp 270 juta yang harus dibayar kontraktor itu, sebagai biaya jaminan proyek itu. (kmb38)



nama Media: *Bali post*

Kategori: *PERSERO DA*

## **Terkendala Naskah Akademik**

### **DPRD Pesimis Ranperda Perubahan Status BPR Buleleng 45 Tuntas**

**Singaraja (Bali Post) -**

Pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) perubahan status Perusahaan Daerah (PD) BPR Buleleng 45 menjadi Perseroan Daerah (Perosda) terkendala naskah akademik. Pihak eksekutif belum menyetorkan naskah akademik kepada panitia khusus (pansus). Atas kondisi itu, pansus yang ditugaskan membahas ranperda itu jadi pesimis dapat menuntaskan pembahasan sampai rancangan ini menjadi peraturan daerah (perda).

Ketua pansus Putu Tirta Adnyana di gedung dewan, Senin (11/2) kemarin, mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan konsultasi ke beberapa daerah yang memiliki regulasi tentang perosda. Seperti konsultasi ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim) dan Kabupaten Bangli. Hasilnya, di Jombang sudah ditetapkan perda dan telah berlaku dan dalam proses pembahasannya dilengkapi landasan naskah akademik yang kuat. Sedangkan, di Kabupaten Bangli sudah menetapkan perda, tetapi tidak dilengkapi naskah akademik. Sesuai PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala daerah wajib mengusulkan ranperda tentang BUMD kepada Kemendagri. Usulan itu dilampiri analisis, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan daerah. Kalau mendapat izin pejabat kementerian, baru dilanjutkan dengan pembahasannya.

"Rancangan ini harus ada naskah akademiknya. Kalau tetap dibahas tanpa naskah akademik, bisa jadi baru berjalan dua tahun akhirnya harus direvisi," katanya.

Naskah akademik itu kata Tirta Adnyana, mutlak dibutuhkan dalam pembahasan ranperda. Sebab, perubahan status Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perosda, itu membutuhkan banyak landasan hukum seperti UU Pemerintahan Daerah, UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Perseroan Terbatas. Atas kondisi ini, dirinya mengaku pesimis ranperda ini dibahas tuntas pada masa sidang saat ini.

"Pembahasannya apakah maksimal kita belum tahu, tetapi kembali lagi ke kemauan daerah. Kalau naskah akademik itu ada, bisa segera kita bahas. Naskah akademik itu perlu penelitian holistik, sehingga bisa menjadi dasar komprehensif," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) mengusulkan mengubah PD BPR Buleleng 45 menjadi Perosda. "Peleburan" lembaga itu untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. (kmb38)



Nama Media: BALI POST

Kategori: KESEHATAN

# Cegah DB, Warga Galakkan PSN

garaja (Bali Post) - Warga BTN Graha Panji, Dusun Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada melakukan Pemberantasan Nyamuk (PSN) secara massal Minggu (10/2) lalu. Warga juga melakukan penyiangan (*fogging*) di lingkungan

setua RT BTN Graha Panji, Nyoman Mider, mengatakan, PSN dan pengasapan massal ini dilakukan guna mencegah kemungkinan merebaknya penyakit demam berdarah (DB). Apalagi, memasuki musim hujan dan mendekati musim kering ini, kasus penyebaran DB mulai merebak, sehingga PSN bersama warga harus digalakkan. Dengan melakukan aksi bersama warga membersihkan lingkungan, warga meyakini tidak ada tempat nyamuk berkembang biak. Selain PSN di lingkungan rumah, warga mengajak setiap warga meningkatkan kesadaran melakukan PSN. Dengan kesadaran meningkat, pihaknya berharap tidak ada warga yang terinfeksi DB.

Mudah-mudahan kesadaran aksi PSN di tempat tinggal, lingkungan kami bisa jauh dari temuan kasus DB," katanya.

Wakil Bupati Buleleng dr. Iwan Sutjiatna, Sp. OG. mengatakan, memasuki puncak musim hujan, yang beralih ke musim kering, penyakit DB itu berpotensi menyebar. Bukan hanya di daerahnya, namun kasus DB juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Pencegahan dengan gerakan PSN dan

berperilaku hidup bersih. Hal itu sebetulnya paling efektif untuk memberantas penyebaran DB itu sendiri.

Dinas Kesehatan (Diskes) sudah diperintahkan melakukan *fogging* secara terjadwal dan menyasar daerah yang terjangkit DB. Tidak ketinggalan penyebaran bubuk obat abate untuk membasmi jentik nyamuk juga digalakkan.

Terkait temuan kasus *suspect* DB, penanganan di puskesmas dan rumah sakit dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pola penanganan ini untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat serangan penyakit DB itu.

"Di Indonesia, secara umum mengalami hal yang sama. Kita di daerah sudah melakukan pencegahan dengan PSN. Penyebaran bubuk abate dan *fogging* itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Hal itu tetap kita lakukan. Sebab, yang paling efektif itu adalah PSN dan menjaga lingkungan agar tetap bersih," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Diskes Buleleng sejak awal Januari 2019 ini, menemukan 77 kasus penularan DB di Buleleng. Dari puluhan kasus, paling banyak terjadi di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada. Syukurnya, puluhan kasus itu hanya *suspect* DB. Namun, kejadian itu cukup mengkhawatirkan, sehingga Diskes mengajak warga menggalakkan PSN. Selain itu, secara rutin, pemerintah melaksanakan *fogging* dengan cara Ultra Low Volume (ULV). (kmb38)



FOGGING - Warga BTN Graha Panji Asri Dusun Bangah, Desa Panji